

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 dan penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kabupaten Gresik Tahun 2025-2029.

Sebagai dokumen perencanaan tahunan, Rencana Kerja Kecamatan Cerme memuat Kebijakan Pembangunan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan Tahun 2026, spektrum pembiayaan, sebagai alat untuk mengimplementasikan pelaksanaan program meliputi pendanaannya yang terkait dengan APBD Kabupaten Gresik melalui RKA dan DPA.

Proses penyusunan Rencana Kerja Kecamatan didasarkan pada penjaringan aspirasi yang secara formal di formulasikan melalui Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Oleh karena itu, secara kontekstual dalam mekanisme perencanaan secara substantif Rencana Kerja Kecamatan Cerme Tahun 2026 mengintegrasikan program-program Pemerintah Daerah yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Rencana Kerja Kecamatan Cerme Tahun 2026 yang memuat Program dan Kegiatan Kecamatan akan dijabarkan secara rinci dalam agenda pembangunan dengan maksud sebagai landasan dan pedoman bagi semua pelaku pembangunan dalam mengimplementasikan kegiatan pembangunan di Kecamatan Cerme

1.3. Landasan Hukum

Adapun ketentuan peraturan perundangan sebagai landasan penyusunan Renja Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik Tahun 2026 antara lain meliputi :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Strategis Pemerintah Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi,

Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender di Kabupaten Gresik
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021;
16. Peraturan Bupati Gresik Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Satu Data Kabupaten Gresik
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2045;
18. Peraturan Bupati Gresik Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Gresik Perkotaan Tahun 2023-2043;
19. Peraturan Bupati Gresik Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Gresik;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 03 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029

1.3. Maksud dan Tujuan

A. Maksud

Rencana Kerja Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik Tahun 2026 disusun dengan maksud sebagai berikut :

1. Memberikan gambaran kondisi Kecamatan Cerme dalam kurun waktu 1 (satu) tahun ke depan yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pembangunan serta pelayanan masyarakat yang prima.
2. Memberikan acuan landasan yang kuat dan jelas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
3. Sebagai dasar evaluasi dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban kinerja Kecamatan Cerme dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) untuk tahun ke 2 dalam pelaksanaan Renstra Kecamatan Cerme Tahun 2025-2029.

B. Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Renja Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik Tahun 2026 ini adalah :

1. Mewujudkan keterpaduan dan mensinergikan perencanaan pembangunan Kecamatan Cerme ;
2. Sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik Tahun 2026 sehingga terjadi konsistensi antara perencanaan dan penganggaran;

1.4. Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Kerja Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik Tahun 2026 terdiri dari 5 (Lima) bab dan lampiran yang memuat Perencanaan Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah ini disusun dengan Sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Rencana kerja Kecamatan Cerme agar substansi pada bab – bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang :

Menggambarkan pengertian ringkas tentang Renja Kecamatan Cerme, proses penyusunan Renja awal OPD, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Rencana Kerja OPD Kec. Cerme, Renstra Kecamatan Cerme dan RPJMD Daerah. serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD;

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang – undang Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan Peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah;

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja OPD Kecamatan Cerme ;

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Rencana kerja OPD Kecamatan Cerme serta garis besar isi dokumen Renja .

BAB II HASILEVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Cerme Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD Kecamatan Cerme Tahun ke 2

Menjelaskan hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD Kec. Cerme tahun lalu (tahun n-2 atau 2025) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1 atau 2027), dengan mengacu pada APBD tahun berjalan (2026) yang sudah disyahkan.

Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun - tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun Lalu, dan realisasi Renstra, mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan dan/atau realisasi penyerapan APBD untuk yang bersangkutan; Pokok - pokok materi yang disajikan dalam bab ini antara lain:

1. Realisasi program kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan.
2. Realisasi Program/Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
3. Realisasi Program/Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
4. Faktor – faktor penyebab tidak tercapainya terpenuhinya
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah dan;
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Tabel yang perlu disajikan adalah Tabel T-C.29 yang disesuaikan dengan Perangkat Daerah masing – masing

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Memuat tentang kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah

ditentukan dalam SKM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing - masing Perangkat Daerah , serta ketentuan peraturan perundang - undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Jika Perangkat Daerah yang bersangkutan belum mempunyai tolak ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap Perangkat Daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolak ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing - masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma standart pelayanan Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pada pembahasan sub bab ini disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan OPD Kec. Cerme , dengan format Tabel T-C.30

2.3 Isu - isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan uraian mengenai :

- 2.3.1 Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan OPD Kec.Cerme dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Publik ;
- 2.3.2 Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah ;
- 2.3.3 Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi OPD Kec.Cerme , terhadap capaian program yang sudah di tentukan dalam Renja.
- 2.3.4 Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat ,
- 2.3.5 Formulasi isu – isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan .

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD.

Berisikan uraian mengenai :

- 2.4.1 Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan
- 2.4.2 Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan.
- 2.4.3 Penjelasan temuan – temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya terhadap rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda.
- 2.4.4 Lampiran tabel berikut, Tabel T- C.31.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .

Dalam bagian ini menguraikan hasil kajian atas program/ kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan pelayanan ,seperti Pemerintahan Desa dan Perangkat Daerah lain serta hasil pencermatan usulan dari pelaksana musrenbang Kecamatan .

Deskripsi yang perlu disajikan dalam sub bab ini antara lain :

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/ kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah .
3. Menyajikan Tabel T-C.32.

BAB III TUJUAN. SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi.

Menjelaskan tentang hasil penelaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi, khususnya penelaahan yang menyangkut arahan kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan provinsi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.Diskripsi

untuk mengisi sub – sub ini mengacu pada kertas kerja bagian telaahan terhadap kebijakan nasional:

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja (Rencana Kerja).

Perumusan Tujuan dan Sasaran didasarkan atas rumusan isu - isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra.

3.3. Program dan Kegiatan.

Penyusunan Program dan Kegiatan OPD Kec. Cerme yang direncanakan dalam Renja Kecamatan Cerme mengacu pada:

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenkaltur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - Keputusan menteri dalam negeri Nomor 050-308 Tahun 2020 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenkaltur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2025 Maupun Renja Tahun 2024
 - SKM (Standar Kepuasan Masyarakat) dan mempertimbangkan capaian kinerja SKM yang ada (jika SKM untuk kegiatan dimaksud tersedia)
 - Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2020;
 - Hasil Musrenbang Kecamatan;
- Dan bab ini berisikan penjelasan mengenai :
- a. Faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan diantaranya terkait dengan:
1. Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah ;
 2. Pencapaian SDG's ;
 3. Pengentasan Kemiskinan ;
 4. Pencapaian NSPK dan SPM ;
 5. Pendatagunaan Potensi Ekonomi Daerah ;

6. Pengembangan Darah terisolir, dst.
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan antara lain meliputi ;
 1. Jumlah program dan jumlah kegiatan ;
 2. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (bisa tersebar ke berbagai Pemerintahan Desa dan apa saja yang terfokus pada kelompok /Lembaga masyarakat tertentu) ;
 3. Total kebutuhan dana / pagu indikator yang dirinci menurut sumber pendanaannya.
- c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program / kegiatan, Pagu indikator, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Berisikan tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan Tabel T-C.33

BAB V P E N U T U P

Berisikan uraian penutup, berupa :

1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun ketersediaan anggaran sesuai dengan kebutuhan .
2. Kaidah – kaidah pelaksanaan.
3. Rencana tindak lanjut.

LAMPIRAN :

1. SK RENJA 2026
2. Matriks Renja 2026

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Cerme Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD Kecamatan Cerme Tahun ke 2

Dokumen Rencana Kerja Kecamatan Cerme merupakan bagian dari proses perencanaan tahunan perangkat daerah yang mencakup penjabaran program kerja tahunan serta arah strategis pembangunan di wilayah kecamatan. Keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan program atau kegiatan yang telah direncanakan dapat dievaluasi melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.

Akuntabilitas adalah wujud tanggung jawab atas pencapaian maupun ketidaktercapaian pelaksanaan misi organisasi dalam meraih tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pertanggungjawaban ini disampaikan secara berkala melalui mekanisme pelaporan yang sistematis.

Sehubungan dengan hal tersebut, dokumen Rencana Kerja Kecamatan Cerme ini berfungsi sebagai dasar dalam mengevaluasi capaian kinerja kegiatan dan sasaran, berdasarkan hasil yang telah dicapai atau dilaksanakan selama tahun 2025, serta sebagai acuan dalam memperkirakan target anggaran Tahun 2026.

Rencana kerja dan pendanaan ini tidak hanya mencerminkan kebutuhan dan prioritas pembangunan di Kecamatan Cerme, tetapi juga memperhitungkan ketercapaian target anggaran serta efektivitas pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan. Penyusunan dokumen ini bertujuan untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah, serta sebagai dasar evaluasi kinerja dan pengambilan keputusan dalam pembangunan daerah ke depan.

Seiring dengan berjalannya waktu, pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Cerme Tahun 2025 telah selesai dilaksanakan. Evaluasi terhadap berbagai program dan kegiatan yang telah dilakukan menjadi bagian penting dalam menyusun langkah-langkah strategis selanjutnya. Dengan demikian, rencana kerja yang disusun diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara tepat sasaran, efisien, dan akuntabel.

Berikut kami sampaikan **Tabel T-C.29** sebagai laporan evaluasi hasil pelaksanaan rencana kerja Kecamatan Cerme sampai dengan tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 2.1 (T-C.29)

**REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH
s/d TAHUN 2025
KECAMATAN CERME KABUPATEN GRESIK**

Kode				Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun(n-2) 2025	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2026	
								Target Renja PD tahun 2025	Realisasi Renja PD Tahun 2025 (Refocusing)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	(8)=(7)/(6)	9	10	(11)=(10)/(4)
1				UNSUR KEWILAYAHAN									
01				KECAMATAN CERME									
1	0	2		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Cerme								
1	2	01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
1	2	01	2	Koodinasi dan Penyusunan RKA SKPD	Terlaksananya Koodinasi dan Penyusunan RKA SKPD	1Dokumen	100%	225.000	-	100%	100%	1Dokumen	
1	2	01	3	Koodinasi dan Penyusunan Perubahan RKA SKPD	Terlaksananya Koodinasi dan Penyusunan DPA SKPD	1Dokumen	100%	225.000	-	100%	100%	1Dokumen	
1	2	01	4	Koodinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Terlaksananya Koodinasi dan Penyusunan DPA SKPD	1Dokumen	100%	225.000	-	100%	100%	1Dokumen	
1	2	01	5	Koodinasi dan Penyusunan Perubahan DPA -SKPD	Terlaksananya Koodinasi dan Penyusunan Perubahan DPA -SKPD	1Dokumen	100%	225.000	-	100%	100%	1Dokumen	
1	2	01	6	Koodinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	Terlaksananya Koodinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	1 Laporan	100 %	225.000		100%	100%	1 laporan	
1	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									

1	2	02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN	21 Orang/ bln	100 %	3.103.686.426,90			100%	23 Orang/ bln	
1	2	02	2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	100%	215.800			100%	1 Laporan	
1	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah									
1	2	06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersediannya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	100 %	2.978.600			100%	1 Paket	
1	2	06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersediannya peralatan dan perlengkapan kantor	1 Paket	100 %	4.968.800			100%	1 Paket	
1	2	06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	1 Paket	100 %	3.281.900			100%	1 Paket	
1	2	06	4	Penyediaan Bahan Logistik	Tersedianya makanan dan minuman hariandan kegiatan	1 Paket	100 %	27.334.000			100%	1 Paket	
1	2	06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan	1 Paket	100 %	1.685.200			100%	1 Paket	
1	2	06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12 Dokumen	100 %	2.688.400			100%	12 Dokumen	
1	2	06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terpenuhinya pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi	1 Laporan	100%	7.442.000			100%	1 Laporan	
1	2	06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terpenuhinya pelaksanaan dukungan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	1 Dokumen	100 %	9.925.200			100%	1 Dokumen	
1	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
1	2	08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya kebutuhan listrik,air dan telepon	12 Laporan	100%	92.726.400			100%	12 Laporan	
1	2	08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	Tersedianya pengelola keuangan/aset/barag	12 Laporan	100%	287.820.000			100%	12 Laporan	
1	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
1	2	09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya kendaraan operasional Dinas kantor OPD	2 Unit	100%	46.970.000	-		100%	2 Unit	

1	2	09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya aset milik Pemerintah daerah	1 Unit	100%	21.224.000	-		100%	1 Unit	
1	2	09	4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya aset milik Pemerintah daerah	4 Unit	100%	6.100.000	-		100%	4 Unit	
1	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK									
1	02	02		Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan									
1	02	02	3	Peningkatan Efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Terpenuhinya sarana dan prasarana pelayanan masyarakat di kecamatan	1 Laporan	100%	1.356.000			100%	1 Laporan	
1	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN									
1	03	01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa									
1	03	01	1	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan didesa	Terlaksananya fasilitasi perencanaan pembangunan di Desa	5 Lembaga Kemasyar akatan	100%	29.032.000			100%	5 Lembaga Kemasyara katan	
1	03	01	3	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Terlaksananya Fasilitasi kelembagaan yang ada di Desa	1 Laporan	100%	25.211.500			100%	1 Laporan	
01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM									
04	2	01		Koordinasi upaya penyelenggaraan Ketentramana dan ketertiban umum									
04	2	01	1	Sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan	Terwujudnya koordinasi Muspika di tingkat kecamatan	12 Laporan	100%	41.254.000			100%	12 Laporan	
01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA									
06	2	01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa									
06	2	01	1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan peraturan kepala Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi penyusunan perdes dan perkades	1 Dokumen	100	7.622.000	0		100%	1 Dokumen	

06	2	01	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Meningkatnya SDM Perangkat Desa dalam tata kelola Administrasi Desa	1 Dokumen	100	9.408.000			100%	1 Dokumen	
06	2	01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan aset desa	Meningkatnya pemahaman perangkat Desa tentang pengelolaan keuangan dan aset Desa	1 Dokumen	100	9.886.400			100%	1 Dokumen	
06	2	01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Terlaksananya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum	1 Dokumen	100	4.856.400			100%	1 Dokumen	
06	2	01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas , Fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan	Meningkatnya pemahaman Lembaga tentang Tupoksinya	1 Laporan	100	4.832.000			100%	1 Laporan	

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD Kec. Cerme tahun lalu, dan realisasi Renstra Kecamatan Cerme

yang mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan OPD Kec. Cerme dan / atau realisasi APBD untuk OPD Kec. Cerme adalah :

1. Realisasi program / kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan adalah : Nol semua memenuhi target kinerja
2. Realisasi Program/Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah :
program Peningkatan Kualitas Pelayanan di Kecamatan dengan Kegiatan Aplikasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan pada tahun 2024 Target Pelayanan 8.250 pelayanan terealisasi 8.476 atau (102 %) dan Nilai IKM target 92 terealisasi 97,04 atau (100.99 %)
3. Faktor – faktor penyebab tidak tercapainya/ terpenuhinya atau melebihi target kinerja Program / Kegiatan adalah :
Program / Kegiatan yang melebihi target adalah : -
4. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah adalah :
 1. Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
 2. Meningkatnya kualitas Sarana Prasarana Aparatur
 3. Terselenggaranya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu
 4. Terselenggaranya tata kelola pemerintahan Desa yang akuntabel.
Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor – faktor penyebab tersebut adalah :
 1. Perlu adanya penambahan Personil di Kecamatan Cerme
 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3. Ketersediaan anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan akan diusulkan melalui PAK tahun berjalan dan apabila tidak terealisasi maka akan diusulkan melalui tahun anggaran berikutnya.

Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan OPD sangat diperlukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab keberhasilan dan ketidakberhasilan kinerja, yang pada akhirnya dapat disimpulkan adanya masalah kinerja sebagai bahan pengambilan keputusan manajemen, untuk meningkatkan kinerja melalui alokasi, distribusi dan regulasi. Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang didalamnya terdapat beberapa Sub Pelaksana yaitu Sub Bagian dan Seksi sebagai pelaksana program dan kegiatan, maka segala pencapaian komponen Renstra tidak dapat dilepaskan dengan tugas dan fungsi masing-masing Sub Pelaksana Program dan Kegiatan sesuai dengan tingkat kewenangan yang diberikan.

Pencapaian kinerja pelayanan OPD Kecamatan Cerme yang berdasarkan pada penetapan renstra realisasi capaian di OPD Kecamatan Cerme dapat disampaikan sebagai berikut:

Tabel 2.2 (T-C.30)
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN CERME
KABUPATEN GRESIK

No	Indikator	Target Renstra				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
		2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	
(1)	(2)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Nilai Hasil Survei Kepuasan Masyarakat.	88	89	89	89	88	91,8	92	93	

2	Rasio Pendanaan Pendidikan di Pedesaan		1-1	1-1	1-1	1-1	1-1	1-1	1-1	
3	Rasio Pendanaan Kesehatan di pedesaan		1-1	1-1	1-1	1-1	1-1	1-1	1-1	
4	Rasio Pendanaan perlindungan anak di pedesaan		1-1	1-1	1-1	1-1	1-1	1-1	1-1	
5	Rasio Pendanaan Pemberdayaan Perempuan di pedesaan		1-1	1-1	1-1	1-1	1-1	1-1	1-1	
6	Rasio Belanja Infrastruktur desa		1-1	1-1	1-1	1-1	1-1	1-1	1-1	
7	Rasio Pembiayaan Penanggulangan Bencana oleh desa		1-1	1-1	1-1	1-1	1-1	1-1	1-1	

2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

1. Pemantapan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum

a. Isu dan Permasalahan

Ruang kerja kurang memadai perlu adanya Perhatian dari Pemerintahan Kabupaten sehingga Ruang kerja bisa lebih Representatif,

b. Arah Kebijakan

Pengajuan Lanjutan pembangunan gedung kantor kecamatan Cerme di .

c. Sasaran Kebijakan

Perlu adanya Pengada Ruang tempat kerja di Kecamatan Cerme

2. Mengembangkan Kualitas Pelayanan Publik

a. Isu dan Permasalahan

Masih ada kepengurusan dokumen yang harus datang langsung ke Kependudukan dan Catatan Sipil Gresik;

b. Arah Kebijakan

Banyaknya warga masyarakat Cerme yang mengurus catatan kependudukan harapannya bisa lebih cepat terselesaikan.

c. Sasaran Kebijakan

Masyarakat yang mengajukan pengurusan catatan kependudukan dapat terlayani tepat waktu.

3. Pengembangan Kualitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah

a. Isu dan Permasalahan

Kualitas dan kuantitas aparatur / tenaga masih kurang belum optimal baik aparatur desa maupun kecamatan

b. Arah Kebijakan

Meningkatnya kompetensi SDM Aparatur serta optimalisasi Penataan Sistem dan Kelembagaan

c. Sasaran Kebijakan

Tercapainya peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Aparatur serta semakin mantapnya sistem dan kelembagaannya.

4. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan

a. Isu dan Permasalahan

Belum Optimalnya Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi, dan Simplifikasi Perencanaan Pembangunan

b. Arah Kebijakan

Semakin Mantapnya Manajemen Pembangunan Daerah dan Keterpaduan Program

c. Sasaran Kebijakan

Mencapai Ketersediaan Kualitas dan Kuantitas Dokumen Perencanaan serta terciptanya Keterpaduan Substansi dan Urgensi Perencanaan Pembangunan Daerah

5. Pengembangan Sarana dan Prasarana Aparatur

a. Isu dan Permasalahan

Sarana dan prasana yang ada masih kurang dan belum dimanfaatkan secara maksimal

b. Arah Kebijakan

Meningkatkan jumlah sarana dan prasarana yang tersedia dan pemanfaatannya secara maksimal

c. Sasaran Kebijakan

Tercapainya sarana dan prasarana yang cukup dan representatif.

6. Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Umum

a. Isu dan Permasalahan

Belum Optimal pelaksanaan penertiban peraturan daerah karena jumlah personil sangat kurang dan masih kurangnya kesadaran masyarakat.

b. Arah Kebijakan

Mengoptimalkan petugas yang ada dan mengajukan penambahan personil serta memberikan arahan, pembinaan kepada anggota Linmas desa untuk bersama-sama menciptakan kondisi yang aman dan kondusif.

c. Sasaran Kebijakan

Terwujudnya lingkungan yang aman, tertib dan kondusif.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Proses rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kecamatan Cerme tahun 2026 yang dilakukan melalui Musrenbang Perangkat Daerah (SIPD) yang memuat usulan program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Kecamatan Cerme, bila dibanding dengan hasil analisa kebutuhan tidak sesuai dengan rancangan awal karena adanya perubahan pagu anggaran, maka perlu adanya review terhadap rancangan awal RKPD dengan menyesuaikan pagu anggaran yang telah ditetapkan.

Tabel 2.3 (Tabel T-C.31)

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026
Kabupaten Gresik
Kecamatan Cerme

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TAR GET AKHI R PERI ODE REN STR A OPD	REA LISA SI CAP AIAN RENJ A OPD TAH UN 2024	PRA KIRA AN CAP AIAN TAR GET RENJ A OPD TAH UN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KEL OMP OK SAS ARA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TAR GET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIO NAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		KECAMATAN MENGANTI						3.720.974.586,00							3.720.974.586,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						3.720.974.586,00							3.720.974.586,00	
	7.01	KECAMATAN						3.720.974.586,00							3.720.974.586,00	
1,	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	3.593.318.186,00						-	3.593.318.186,00	

	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	2.430.000,00			-	#GRESIK_TUNTAS Penguatan Reformasi Birokrasi didukung Pelayanan Publik Inklusif dan Responsif Gender serta Pengembangan Smart Governance Berbasis Satu Data Pembangunan	-	-	2.430.000,00	KECAMATAN MENGANTI
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	405.000,00	Kab. Gresik, Menganti, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	#GRESIK_TUNTAS Penguatan Reformasi Birokrasi didukung Pelayanan Publik Inklusif dan Responsif Gender serta Pengembangan Smart Governance Berbasis Satu Data Pembangunan	-		405.000,00	KECAMATAN MENGANTI
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														

			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	405.000,00	Kab. Gresik, Menganti, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	#GRESIK_TUNTAS Penguatan Reformasi Birokrasi didukung Pelayanan Publik Inklusif dan Responsif Gender serta Pengembangan Smart Governance Berbasis Satu Data Pembangunan	-		405.000,00	KECAMATAN MENGANTI
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	405.000,00	Kab. Gresik, Menganti, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	#GRESIK_TUNTAS Penguatan Reformasi Birokrasi didukung Pelayanan Publik Inklusif dan Responsif Gender serta Pengembangan Smart Governance Berbasis Satu Data Pembangunan	-		405.000,00	KECAMATAN MENGANTI
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														

			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	405.000,00	Kab. Gresik, Menganti, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	#GRESIK_TUNTAS Penguatan Reformasi Birokrasi didukung Pelayanan Publik Inklusif dan Responsif Gender serta Pengembangan Smart Governance Berbasis Satu Data Pembangunan	-		405.000,00	KECAMATAN MENGANTI
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	405.000,00	Kab. Gresik, Menganti, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	#GRESIK_TUNTAS Penguatan Reformasi Birokrasi didukung Pelayanan Publik Inklusif dan Responsif Gender serta Pengembangan Smart Governance Berbasis Satu Data Pembangunan	-		405.000,00	KECAMATAN MENGANTI
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	405.000,00	Kab. Gresik, Menganti, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	#GRESIK_TUNTAS Penguatan Reformasi Birokrasi didukung Pelayanan Publik Inklusif dan Responsif Gender serta Pengembangan Smart Governance Berbasis Satu Data Pembangunan	-		405.000,00	KECAMATAN MENGANTI
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	3.104.847.427,00			-	#GRESIK_TUNTAS Penguatan Reformasi Birokrasi didukung Pelayanan Publik Inklusif dan Responsif Gender serta Pengembangan Smart Governance Berbasis Satu Data Pembangunan	-	-	3.104.847.427,00	KECAMATAN MENGANTI
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				24 Orang/bulan	3.103.686.427,00	Kab. Gresik, Menganti, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	#GRESIK_TUNTAS Penguatan Reformasi Birokrasi didukung Pelayanan Publik Inklusif dan Responsif Gender serta Pengembangan Smart Governance Berbasis Satu Data Pembangunan	-		3.103.686.427,00	KECAMATAN MENGANTI
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	411.000,00	Kab. Gresik, Menganti, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	#GRESIK_TUNTAS Penguatan Reformasi Birokrasi didukung Pelayanan Publik Inklusif dan Responsif Gender serta Pengembangan Smart Governance Berbasis Satu Data Pembangunan	-		411.000,00	KECAMATAN MENGANTI
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														

			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				4 Laporan	750.000,00	Kab. Gresik, Menganti, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	#GRESIK_TUNTAS Penguatan Reformasi Birokrasi didukung Pelayanan Publik Inklusif dan Responsif Gender serta Pengembangan Smart Governance Berbasis Satu Data Pembangunan	-		750.000,00	KECAMATAN MENGANTI
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	49.009.081,00			-	#GRESIK_TUNTAS Penguatan Reformasi Birokrasi didukung Pelayanan Publik Inklusif dan Responsif Gender serta Pengembangan Smart Governance Berbasis Satu Data Pembangunan	-	-	49.009.081,00	KECAMATAN MENGANTI
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2.978.600,00	Kab. Gresik, Menganti, Semua Kel/Desa	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	-	#GRESIK_ TUNTAS Penguatan Reformasi Birokrasi didukung Pelayanan Publik Inklusif dan Responsif Gender serta Peng embangan Smart Gov ernance Berbasis Satu Data Pembangu nan	-		2.978.600,00	KECAMATAN MENGANTI
	7.01.01.2.06.000 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	4.969.900,00	Kab. Gresik, Menganti, Semua Kel/Desa	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	-	#GRESIK_ TUNTAS Penguatan Reformasi Birokrasi didukung Pelayanan Publik Inklusif dan Responsif Gender serta Peng embangan Smart Gov ernance Berbasis Satu Data Pembangu nan	-		4.969.900,00	KECAMATAN MENGANTI
	7.01.01.2.06.000 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				Paket	3.281.900,00	Kab. Gresik, Menganti, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	#GRESIK_TUNTAS Penguatan Reformasi Birokrasi didukung Pelayanan Publik Inklusif dan Responsif Gender serta Pengembangan Smart Governance Berbasis Satu Data Pembangunan	-		3.281.900,00	KECAMATAN MENGANTI
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				Paket	11.794.000,00	Kab. Gresik, Menganti, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	#GRESIK_TUNTAS Penguatan Reformasi Birokrasi didukung Pelayanan Publik Inklusif dan Responsif Gender serta Pengembangan Smart Governance Berbasis Satu Data Pembangunan	-		11.794.000,00	KECAMATAN MENGANTI
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														

			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				Paket	3.371.081,00	Kab. Gresik, Menganti, Semua Kel/Desa	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	-	#GRESIK_ TUNTAS Penguatan Reformasi Birokrasi didukung Pelayanan Publik Inklusif dan Responsif Gender serta Peng embangan Smart Gov ernance Berbasis Satu Data Pembangu nan	-		3.371.081,00	KECAMATAN MENGANTI
	7.01.01.2.06.000 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan				12 Doku men	2.688.400,00	Kab. Gresik, Menganti, Semua Kel/Desa	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	-	#GRESIK_ TUNTAS Penguatan Reformasi Birokrasi didukung Pelayanan Publik Inklusif dan Responsif Gender serta Peng embangan Smart Gov ernance Berbasis Satu Data Pembangu nan	-		2.688.400,00	KECAMATAN MENGANTI
	7.01.01.2.06.000 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	10.000.000,00	Kab. Gresik, Menganti, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	#GRESIK_TUNTAS Penguatan Reformasi Birokrasi didukung Pelayanan Publik Inklusif dan Responsif Gender serta Pengembangan Smart Governance Berbasis Satu Data Pembangunan	-		10.000.000,00	KECAMATAN MENGANTI
	7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	9.925.200,00	Kab. Gresik, Menganti, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	#GRESIK_TUNTAS Penguatan Reformasi Birokrasi didukung Pelayanan Publik Inklusif dan Responsif Gender serta Pengembangan Smart Governance Berbasis Satu Data Pembangunan	-		9.925.200,00	KECAMATAN MENGANTI

	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	380.546.400,00			-	#GRESIK_TUNTAS Penguatan Reformasi Birokrasi didukung Pelayanan Publik Inklusif dan Responsif Gender serta Pengembangan Smart Governance Berbasis Satu Data Pembangunan	-	-	380.546.400,00	KECAMATAN MENGANTI
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	92.726.400,00	Kab. Gresik, Menganti, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	#GRESIK_TUNTAS Penguatan Reformasi Birokrasi didukung Pelayanan Publik Inklusif dan Responsif Gender serta Pengembangan Smart Governance Berbasis Satu Data Pembangunan	-		92.726.400,00	KECAMATAN MENGANTI
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	287.820.000,00	Kab. Gresik, Menganti, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	#GRESIK_TUNTAS Penguatan Reformasi Birokrasi didukung Pelayanan Publik Inklusif dan Responsif Gender serta Pengembangan Smart Governance Berbasis Satu Data Pembangunan	-		287.820.000,00	KECAMATAN MENGANTI
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	56.485.278,00			-	#GRESIK_TUNTAS Penguatan Reformasi Birokrasi didukung Pelayanan Publik Inklusif dan Responsif Gender serta Pengembangan Smart Governance Berbasis Satu Data Pembangunan	-	-	56.485.278,00	KECAMATAN MENGANTI
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	46.970.000,00	Kab. Gresik, Menganti, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	#GRESIK_TUNTAS Penguatan Reformasi Birokrasi didukung Pelayanan Publik Inklusif dan Responsif Gender serta Pengembangan Smart Governance Berbasis Satu Data Pembangunan	-		46.970.000,00	KECAMATAN MENGANTI
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi				1 Unit	3.415.278,00	Kab. Gresik, Menganti, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	#GRESIK_TUNTAS Penguatan Reformasi Birokrasi didukung Pelayanan Publik Inklusif dan Responsif Gender serta Pengembangan Smart Governance Berbasis Satu Data Pembangunan	-		3.415.278,00	KECAMATAN MENGANTI
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi				10 Unit	6	Kab. Gresik, Menganti, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	#GRESIK_TUNTAS Penguatan Reformasi Birokrasi didukung Pelayanan Publik Inklusif dan Responsif Gender serta Peng embangan Smart Gov ernance Berbasis Satu Data Pembangu nan	-		00.000,00	6.1	KECAMATAN MENGANTI
2,	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-			-	6					-		12.000,00	6.8	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-			-	6			-	#GRESIK_TUNTAS Penguatan Reformasi Birokrasi didukung Pelayanan Publik Inklusif dan Responsif Gender serta Peng embangan Smart Gov ernance Berbasis Satu Data Pembangu nan	-	-	12.000,00	6.8	KECAMATAN MENGANTI

	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	6 .812.000,00	Kab. Gresik, Menganti, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	#GRESIK_TUNTAS Penguatan Reformasi Birokrasi didukung Pelayanan Publik Inklusif dan Responsif Gender serta Pengembangan Smart Governance Berbasis Satu Data Pembangunan	-		6.8 12.000,00	KECAMATAN MENGANTI
3,	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			-	63.934.800,00						-	63. 934.800,00	

	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-			-	63.934.800,00			-	#GRESIK_TUNTAS Penguatan Reformasi Birokrasi didukung Pelayanan Publik Inklusif dan Responsif Gender serta Pengembangan Smart Governance Berbasis Satu Data Pembangunan	-	-	934.800,00	63.	KECAMATAN MENGANTI
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa															
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				5 Lembaga Masyarakat	19.612.000,00	Kab. Gresik, Menganti, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	#GRESIK_TUNTAS Penguatan Reformasi Birokrasi didukung Pelayanan Publik Inklusif dan Responsif Gender serta Pengembangan Smart Governance Berbasis Satu Data Pembangunan	-		612.000,00	19.	KECAMATAN MENGANTI
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan															

			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	44.322.800,00	Kab. Gresik, Menganti, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	#GRESIK_TUNTAS Penguatan Reformasi Birokrasi didukung Pelayanan Publik Inklusif dan Responsif Gender serta Pengembangan Smart Governance Berbasis Satu Data Pembangunan	-		322.800,00	44.	KECAMATAN MENGANTI
4,	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-			-	31.288.000,00					-		288.000,00	31.	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-			-	31.288.000,00			-	#GRESIK_TUNTAS Penguatan Reformasi Birokrasi didukung Pelayanan Publik Inklusif dan Responsif Gender serta Pengembangan Smart Governance Berbasis Satu Data Pembangunan	-	-	288.000,00	31.	KECAMATAN MENGANTI

	7.01.04.2.01.000 1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan															
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	31.288.000,00	Kab. Gresik, Menganti, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	#GRESIK_TUNTAS Penguatan Reformasi Birokrasi didukung Pelayanan Publik Inklusif dan Responsif Gender serta Pengembangan Smart Governance Berbasis Satu Data Pembangunan	-		288.000,00	31.	KECAMATAN MENGANTI
5,	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-			-	25.621.600,00						-	25.621.600,00		

	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-			-	25.621.600,00			-	#GRESIK_TUNTAS Penguatan Reformasi Birokrasi didukung Pelayanan Publik Inklusif dan Responsif Gender serta Pengembangan Smart Governance Berbasis Satu Data Pembangunan	-	-	25.621.600,00	KECAMATAN MENGANTI
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				1 Dokumen	2.814.000,00	Kab. Gresik, Menganti, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	#GRESIK_TUNTAS Penguatan Reformasi Birokrasi didukung Pelayanan Publik Inklusif dan Responsif Gender serta Pengembangan Smart Governance Berbasis Satu Data Pembangunan	-		2.814.000,00	KECAMATAN MENGANTI

	7.01.06.2.01.000 2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				1 Doku men	.958.000,00	1	Kab. Gresik, Menganti, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	#GRESIK_TUNTAS Penguatan Reformasi Birokrasi didukung Pelayanan Publik Inklusif dan Responsif Gender serta Pengembangan Smart Governance Berbasis Satu Data Pembangunan	-		58.000,00	1.9	KECAMATAN MENGANTI
	7.01.06.2.01.000 3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				2 Doku men	.012.800,00	5	Kab. Gresik, Menganti, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	#GRESIK_TUNTAS Penguatan Reformasi Birokrasi didukung Pelayanan Publik Inklusif dan Responsif Gender serta Pengembangan Smart Governance Berbasis Satu Data Pembangunan	-		12.800,00	5.0	KECAMATAN MENGANTI
	7.01.06.2.01.000 9	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa																

			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				1 Dokumen	2 542.800,00	Kab. Gresik, Menganti, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	#GRESIK_TUNTAS Penguatan Reformasi Birokrasi didukung Pelayanan Publik Inklusif dan Responsif Gender serta Pengembangan Smart Governance Berbasis Satu Data Pembangunan	-		2.5 42.800,00	KECAMATAN MENGANTI
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				12 Laporan	13.294.000,00	Kab. Gresik, Menganti, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	#GRESIK_TUNTAS Penguatan Reformasi Birokrasi didukung Pelayanan Publik Inklusif dan Responsif Gender serta Pengembangan Smart Governance Berbasis Satu Data Pembangunan	-		13.294.000,00	KECAMATAN MENGANTI
	J U M L A H							3.720.974.586,00								3.720.974.586,00

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

1. Penjelasan tentang proses usulan program / kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut adalah :

Usulan Program / Kegiatan yang dibahas didalam musrenbang. mekanismenya diawali dari penggalan gagasan dari tingkat Dusun/Lingkungan melibatkan unsur Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Unsur Perempuan dan Organisasi Kemasyarakatan sehingga menghasilkan usulan program yang di bawah ke forum Musrenbangdes. Di Forum Musrenbangdes menghasilkan skala prioritas usulan tingkat Desa selanjutnya ditunjuk perwakilan dari Desa untuk mengawal usulan tersebut di Forum Musrenbang Tingkat Kecamatan.

Hasil Musrenbang Kecamatan merupakan Skala prioritas program yang telah sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat serta 5 isu - isu penting dari masing – masing Desa dan Instansi vertikal yang ada pada Unit Pelaksana Teknis di tingkat Kecamatan.

- 2 Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu - isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Kecamatan Cerme adalah :

Perangkat Daerah Kecamatan Cerme melalui Kasi Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat dan Kasi Pemerintahan selaku koordinator pelaksana Kecamatan dalam menanganikegiatan ADD, DD, Bagi Hasil Pajak, dan BK

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kecamatan Cerme adalah :

N O	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS JAWA TIMUR	ARAH KEBIJAKAN PROVINSI	PRIORITAS KABUPATE N	ARAH KEBIJAKAN KABUPATEN
1	2	3	4	5	6
1	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban serta Kesuksesan Pelaksanaan Pemilu	a. Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban terhadap Isu Potensi Konflik dan Penyalahgunaan Obat – obatterlarang dan Narkoba b. Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur yang Adil, Sejahtera, Unggul, dan Berkarakter dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Partisipatoris, Inklusif melalui Kerja Bersama dan Semangat Gotong Royong.	Mewujudkan Gresik Baru yang Mandiri, Sejahtera, Berdaya Saing, dan Berkemajuan Berlandaskan Akhlakul Karimah	Percepatan transformasi ekonomi inklusif dan pemulihan sosial menuju Gresik baru dan peningkatan kualitas kesejahteraan sosial melalui pemenuhan pelayanan dasar serta meningkatkan infrastruktur berketahanan bencana Percepatan pemulihan ekonomi dan reformasi sosial menuju gresik kota inklusif, tangguh dan berkelanjutan Penguatan sdm yang unggul, berkemajuan dan berkebudayaan dilandasi akhlakul karimah Mewujudkan visi pembangunan gresik baru: yang

					mandiri, sejahtera, berdaya saing dan berkembang berlandaskan akhlakul karimah
--	--	--	--	--	--

2.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah .

Keterkaitan tujuan dan sasaran renja didasarkan atas rumusan isu - isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Cerme, yaitu :

Tujuan : Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang berkualitas

Sasaran 1 : Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik

Sasaran 2 : Meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas daerah ditingkat desa

Indikator :

- Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat
- Rasio Pendanaan Pendidikan di Perdesaan
- Rasio Pendanaan Pemberdayaan Kesehatan di Perdesaan
- Rasio Pendanaan Perlindungan Anak di Perdesaan
- Rasio Pendanaan Pemberdayaan Perempuan di Kawasan Perdesaan
- Rasio Belanja Infrastruktur Desa
- Rasio Pembiayaan Penanggulangan Bencana oleh Desa

2.3 Program dan Kegiatan

Berdasarkan Kebijakan yang telah ditetapkan pada Tahun 2021 dan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang

disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 disusun Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun 2026 Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1.1 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah

Dengan Kegiatan-Kegiatan Indikatif :

- a. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- c. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- d. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
- e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Ikhtisar dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- a. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

1.3 Adminsistrasi Umum Perangkat Daerah;

Dengan Kegiatan-Kegiatan Indikatif :

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
- b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
- c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- d. Penyediaan Bahan Logistik
- e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- f. Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
- g. Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD
- h. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

1.4 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak, kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- b) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung dan Bangunan dan Bangunan Lainnya

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN PELAYANAN PUBLIK

Dengan Kegiatan-Kegiatan Indikatif :

- a. Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

URUSAN WAJIB

1. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Dengan Kegiatan-Kegiatan Indikatif :

- a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan pembangunan Desa
- b. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
- c. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat

2. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

Dengan Kegiatan-Kegiatan Indikatif :

- a. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan

3. PROGAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

Dengan Kegiatan-Kegiatan Indikatif :

- a. Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
- b. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
- c. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
- d. Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya

BAB V

P E N U T U P

Sebagai uraian akhir pada bab penutup Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik Tahun 2026 ini disampaikan kaidah pelaksanaan Rencana Kerja SKPD dengan rincian sebagai berikut :

1. Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka dengan ini ditetapkan Rencana Kerja Kecamatan Tahun 2026 sebagai penjabaran Rencana Strategis Kecamatan Cerme Tahun 2025 – 2029 selanjutnya akan dijadikan dasar untuk menyusun Rencana Kinerja Tahunan
2. Dengan ditetapkan Rencana Kerja Kecamatan Tahun 2026 ini, maka semua pihak dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan untuk dijadikan pedoman dalam operasionalisasi peran masing-masing dalam pelaksanaan program kegiatan tahunan
3. Rencana Kerja Kecamatan Cerme Tahun 2026 ini akan dijadikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja Aparatur Kecamatan sekaligus sebagai dasar pembuatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2026
4. Diharapkan dengan tersusunnya Rencana Kerja Kecamatan Cerme Tahun 2026 ini dapat menjadi pedoman Aparatur Pemerintah Kecamatan di dalam melaksanakan program kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
5. Rencana Kerja Kecamatan Cerme Tahun 2026 ini akan dijadikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja secara kumulatif Tahun 2026 dan sekaligus sebagai dasar laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi Tahun 2026

6. Diharapkan dengan tersusunnya Rencana Kerja Kecamatan Cerme Tahun 2026 ini dapat dibangun komitmen bersama dari seluruh jajaran organisasi untuk taat azas dalam perencanaan kinerja Tahun 2026 dan dapat dihindari adanya kesalahan RKA SKPD .

